GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : **Jurnal nasional**	**Tgl/Bln/Thn** : **19 November 2007**
Subyek : **Kehutanan**	**Hari** : **Senin**
	Halaman : **06**

Konsolidasi Rimbawan demi Selamatkan Hutan

JUMAT (16/11) malam, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban ditemani beberapa pejabat Departemen Kehutanan (Dephut) bertatap muka dengan jajaran Dinas Kehutanan se-Sumatera Barat (Sumbar) di Padang. Ini merupakan kedua kalinya Menhut berkunjung dan melakukan konsolidasi dengan para rimbawan di Sumbar, memberikan pengarahan untuk membangun kehutanan Indonesia. Dalam kesempatan itu, berkali-kali Menhut mewanti-wanti jajarannya di daerah, agar bertindak tegas dan berpegang pada aturan hukum yang ada.

"Masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap hukum. Jadi, ikuti saja rel-rel hukum yang ada, agar kita punya kebanggaan sebagai aparat dan hukum kita memiliki kewibawaan," kata Menhut memberi pesan di hadapan puluhan rimbawan yang terdiri dari pimpinan Dinas Kehutanan Sumbar, para ketua dinas yang membidangi kehutanan kabupaten/kota se-Sumbar, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dephut se-Sumbar.

Dalam upaya membangun kehutanan Indonesia, percepatan pemberantasan kejahatan *illegal logging* menjadi prioritas pemerintah. Ini telah menjadi agenda nasional. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sebuah kesamaan definisi dan persepsi. Pedomannya, Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemberantasan *illegal logging*.

Inpres yang ada menegaskan definisi yang jelas, bahwa percepatan pemberantasan *illegal logging* dilakukan di kawasan hutan yang ilegal. Dan, dalam aplikasinya, semua pihak harus saling berkoordinasi. "Perintah itu disampaikan kepada 18 instansi pemerintah, karena banyak masalah kompleks dalam kasus *illegal logging*," kata Kaban.

Kini, secara statistik kasus-kasus kejahatan *illegal logging* menurun tajam di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2004, sungai-sungai Indonesia dipenuhi kayu-kayu gelondongan ilegal. Tak heran kalau pada tahun 2005 terdapat hampir 8000 kasus illegal logging. Namun, pada tahun 2006, kasusnya menciut tinggal 616 kasus. Dan tahun ini, meskipun masih ada, sudah jarang ditemukan kayu-kayu gelondongan ilegal yang memenuhi sungai-sungai di Indonesia.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Untuk lebih menyukseskan agenda nasional ini, malam itu Menhut menegaskan beberapa pesan. Di antaranya, semua rimbawan di daerah harus konsisten dalam pemberantasan *illegal logging*. Mereka juga dipesan untuk berpegang teguh pada komitmen yang berlandaskan peraturan-peraturan yang ada, seperti Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan.

"Ini sangat penting agar jajaran kehutanan memiliki pandangan yang sama dalam upaya memberantas *illegal logging*. Kita harus tegas," ujar Menhut.

Sumbar sendiri, yang memiliki kawasan hutan sangat luas, memiliki komitmen dalam pemberantasan *illegal logging*. Setidaknya, terdapat 40 kasus *illegal logging* yang sedang dalam proses penyidikan di Sumbar. Lima kasus sudah diputuskan di pengadilan. Sedangkan dua kasus lainnya dalam proses P-18. "Dalam rangka mengamankan kawasan hutan, kami juga melaksanakan program hutan berbasis nagari," kata Ketua Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Syahrial Syam.

Dengan kompaknya pemerintah di pusat dan di daerah, ke depan, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi kejahatan *illegal logging*. Dalam aplikasi pemberantasannya, tentu saja ada riak-riak kecil yang menyertai. Namun dengan koordinasi, semua riak tersebut pasti dapat diatasi. n

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP